

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Badan Pusat Statistik (2016) melansir jumlah pengangguran Indonesia dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2016 sebesar 5,61 persen yang dapat diinterpretasikan dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5 hingga 6 orang yang menjadi pengangguran. TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menyumbang prosentase terbesar hingga mencapai angka 11,11 persen. Seperti terlihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), 2014-2016

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2014		2015		2016	
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
SD ke bawah	3,04	3,61	2,74	3,44	2,88	
Sekolah Menengah Pertama	7,15	7,14	6,22	5,76	5,75	
Sekolah Menengah Atas	9,55	8,17	10,32	6,95	8,73	
Sekolah Menengah Kejuruan	11,24	9,05	12,65	9,84	11,11	
Diploma III/IV	6,14	7,49	7,54	7,22	6,04	
Universitas	5,65	5,34	6,40	6,22	4,87	
Jumlah	5,94	5,81	6,18	5,50	5,61	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2016

Data tersebut sesungguhnya sangat menggugah dunia pendidikan, bagaimana mungkin peserta didik yang telah dibekali kemampuan dalam bentuk keahlian dan kompetensi seperti yang diajarkan pada jenjang SMK menjadi penyumbang prosentase pengangguran tertinggi di Indonesia.

Kemudian Badan Pusat Statistik (2017) melakukan pembaharuan data pada November 2017 dalam durasi setahun terakhir didapatkan data bahwa jumlah pengangguran bertambah sebanyak 10 ribu orang, sementara TPT turun

Richard Amri, 2018

*EVALUASI IMPLEMENTASI KURIKULUM PADA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PROGRAM
MENJAHIT DI KABUPATEN BANDUNG BARAT*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sebesar 0,11 poin dari 5,61 persen menjadi 5,50 persen per Agustus 2017 dimana TPT untuk SMK masih paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 11,41 persen. Data tersebut tertera pada tabel 1.2.

Tabel 1.2

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2016-Agustus 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2017

Hal tersebut terasa seperti ironi untuk jalur pendidikan formal, namun menjadi peluang bagi pendidikan nonformal agar dapat tampil membawa solusi demi kemajuan pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa jalur pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling memperkaya dan melengkapi. Dalam pasal 26 ayat (1) lebih diperjelas mengenai pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan bertujuan sebagai penambah, pengganti, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung terlaksananya pendidikan sepanjang hayat. Satuan pendidikan nonformal terdiri dari pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan lain yang sejenis.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas bahwa dipandang perlu dibentuk Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang merupakan salah satu

Richard Amri, 2018

**EVALUASI IMPLEMENTASI KURIKULUM PADA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PROGRAM
MENJAHIT DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bentuk satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dengan mengikuti kursus dan pelatihan, diharapkan mampu menambah khasanah ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan agar dapat berguna untuk diterapkan di dunia usaha atau dunia industri sehingga mampu mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa angka peserta didik berdasarkan status lulus per Propinsi dalam hal ini diambil 5 sampel Propinsi besar per tanggal 2 Maret 2017 terlihat antusiasme yang cukup besar dari masyarakat untuk mengikuti program kursus dan pelatihan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3

Angka peserta didik berdasarkan status lulus di LKP per 5 Propinsi besar

No	Nama Propinsi	Proses Diklat		Bekerja		Berwirausaha		Menunggu Penempatan		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	DKI Jakarta	6	82	88	1746	16	147	25	734	2844
2	Jawa Barat	383	544	2114	3695	239	1418	635	1529	10557
3	Jawa Tengah	2341	3188	6228	14089	1016	2815	7459	8086	45222
4	DI Yogyakarta	8	10	1374	1158	152	451	280	321	3754
5	Jawa Timur	2718	4966	5392	15187	849	1290	4261	5281	39944

Apabila ditelisik lebih lanjut menurut angka jumlah peserta kursus yang terbanyak per Propinsi dimana Jawa Barat termasuk penyumbang angka peserta didik kursus dan pelatihan yang cukup banyak sebesar 10.557 peserta

Richard Amri, 2018

EVALUASI IMPLEMENTASI KURIKULUM PADA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PROGRAM
MENJAHIT DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

didik, untuk angka partisipan terbanyak terdapat di Propinsi Jawa Tengah dengan 45.222 peserta didik. Data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Angka peserta didik berdasarkan Propinsi menurut jumlah peserta didik terbanyak

No	Nama Propinsi	Proses Diklat		Bekerja		Berwirausaha		Menunggu Penempatan		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Jawa Tengah	2341	3188	6228	14089	1016	2815	7459	8086	45222
2	Jawa Timur	2718	4966	5392	15187	849	1290	4261	5281	39944
3	Sulawesi Selatan	477	813	1508	1985	563	757	3566	4625	14294
4	Jawa Barat	383	544	2114	3695	239	1418	635	1529	10557
5	Lampung	276	330	658	675	180	326	1045	1856	5346

Mengacu kepada data rekapitulasi jumlah peserta didik berdasarkan status lulus per jenis keterampilan, peneliti menyortir 17 jenis keterampilan yang memiliki jumlah peserta didik terbanyak adalah sebagai berikut:

No	Jenis Ketrampilan	Proses Diklat		Bekerja		Ber-wirausaha		Menunggu Penempatan		Jml
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Komputer	4106	4857	12152	13486	1943	1520	13093	17867	69024
2	Menjahit	37	677	843	6908	216	4300	127	1623	14731
3	Bahasa Inggris	1196	1530	1137	1180	131	92	2256	2988	10510
4	Lain-lain	29	523	1014	6062	107	367	260	1369	9731
5	Mengemudi	227	168	1604	733	223	109	3013	2089	8166
6	Otomotif	362	2	2118	11	783	5	1331	36	4648
7	Perhotelan	853	626	1539	1051	32	11	187	112	4411
8	Garment	8	21	218	3673	1	48	3	7	3979
9	Baby Sitter	0	655	4	2801	0	2	0	13	3475
10	Akuntansi	146	531	401	1488	6	34	116	411	3133
11	Care Giver	3	622	13	2353	0	2	0	14	3007
12	Spa	13	284	135	1274	7	216	16	292	2237
13	Tata Rias Pengantin	2	128	9	623	18	1271	6	161	2218
14	Tata Kecantikan Rambut	6	127	33	743	43	956	28	179	2115

Richard Amri, 2018

EVALUASI IMPLEMENTASI KURIKULUM PADA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PROGRAM MENJAHIT DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

15	Administrasi Perkantoran	87	449	256	1170	4	3	18	33	2020
16	Bimbingan Belajar	108	144	282	235	7	19	162	255	1212
17	Desain Grafis	180	71	460	269	24	9	51	75	1139

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa kebutuhan akan pendidikan nonformal (PNF) akan terus meningkat seiring dengan perkembangan dunia usaha dan dunia industri. Faktor perubahan paradigma yang menganggap hasil pendidikan formal (sekolah formal) tidak cukup ketika dipergunakan dalam dunia kerja menjadi sebuah kesempatan bagi pendidikan nonformal untuk berkontribusi mengasah pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Penyelenggaraan kurikulum berbasis kompetensi di LKP, merupakan bagian dari proses pendidikan nonformal untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia. Implementasi kurikulum berbasis kompetensi ini merupakan penjabaran dari amanat UU Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 beserta perubahannya tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peningkatan mutu penyelenggaraan dan mutu lulusan ada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal yang berfungsi menyiapkan tenaga kerja berkualitas, LKP dituntut untuk mampu mencetak lulusan dengan kompetensi dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Terlebih lagi dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang membuat persaingan dunia kerja akan semakin ketat.

Berpjik dari tuntutan tersebut, LKP perlu meningkatkan kinerjanya untuk menjaga mutu dan kualitas pendidikan yang dilaksanakannya. Peningkatan

Richard Amri, 2018

*EVALUASI IMPLEMENTASI KURIKULUM PADA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PROGRAM
MENJAHIT DI KABUPATEN BANDUNG BARAT*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kinerja dapat dilakukan dengan pengembangan kurikulum. Kurikulum yang dipergunakan di LKP merupakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang lebih mengutamakan penguasaan kompetensi terhadap bidang tertentu.

Kompetensi menurut Hoffmann (1999) dalam jurnalnya yang berjudul *The Meanings of Competency* adalah (1) unjuk kerja (*observable performances*) merupakan keluaran dari proses pembelajaran; (2) standar kualitas produk yang dihasilkan (*standard or quality outcome*) yang berarti standar dan kualitas hasil yang didapatkan ketika bekerja, (3) atribut yang mendasari seseorang meliputi pengetahuan, keterampilan, atau kemampuan.

Untuk memperkuat atribut kompetensi seperti disebut Hoffman, maka diperlukan kurikulum yang sesuai. Mengingat kondisi LKP bervariasi, baik dilihat dari jenis program kursus, fasilitas, sumber daya manusianya, maka perlu dilakukan studi evaluatif untuk mengetahui proses implementasi kurikulum berbasis kompetensi di LKP. Wahyudin (2014) mengutarakan bahwa

Implementasi kurikulum merupakan pengejawantahan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap perencanaan, kemudian dilakukan ujicoba pelaksanaan dan pengelolaan yang disesuaikan terhadap situasi dan kondisi teraktual di lapangan dengan karakteristik peserta didik yang beragam. (hlm. 33)

Pada riset yang dilakukan oleh Hadi (2012) tentang Evaluasi Implementasi KBK pada LKP Program Otomotif mengungkap fakta yang menarik yaitu dalam tingkat pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan kategori sedang. Hasil analisis data membuktikan bahwa evaluasi dokumen kurikulum pada keempat LKP program otomotif di Yogyakarta dalam kategori sedang dengan pencapaian skor rata-rata 16,50. Dengan kategori sedang ini membuktikan bahwa pencapaian SKL di LKP program otomotif perlu ditingkatkan lagi dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi.

Kemudian Tri Wikanah (2015) yang melakukan penelitian mengenai pengelolaan pembelajaran berbasis kualitas di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Magistra Utama menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran secara berkualitas maka perlu dilakukan pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja, menggunakan media dan multimedia, strategi dan model mengajar yang efektif, dengan perencanaan pembelajaran, melakukan pengawasan proses belajar, mengembangkan pembelajaran secara berkualitas dalam pengaturan ruang atau penataan kelas sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, mencari informasi materi kursus sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, dan membentuk kompetensi peserta didik sesuai KKNI.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 luas Kabupaten Bandung Barat secara keseluruhan adalah 1.305,77 km², dengan cakupan wilayah meliputi 16 (enam belas) kecamatan yang terdiri dari: Padalarang, Cikalongwetan, Cililin, Parongpong, Cipatat, Cisarua, Batujajar, Ngamprah, Gununganhalu, Cipongkor, Cipeundeuy, Lembang, Sindangkerta, Saguling, Cihampelas dan Rongga. Sebagian besar penduduk Kabupaten Bandung Barat bekerja dalam bidang perindustrian dan perdagangan. Pada Tahun 2014, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat melansir data jumlah Industri Besar dan Sedang di Kabupaten Bandung Barat sehingga diketahui terdapat 91 (sembilan puluh satu) industri sedang dan 91 (sembilan puluh satu) industri besar.

Menurut data yang dilansir dari web *infokursus.net*, terdapat 10 (sepuluh) LKP yang menyelenggarakan program menjahit di Kabupaten Bandung Barat. Berlandaskan data tersebut dapat dilihat antusiasme penyelenggaraan program menjahit di Kabupaten Bandung Barat.

Berlandaskan pada studi pendahuluan yang dilakukan di beberapa LKP program menjahit di Kabupaten Bandung Barat, diperoleh data awal mengenai ketidaksesuaian implementasi kurikulum yang diterbitkan oleh Direktorat

Richard Amri, 2018

**EVALUASI IMPLEMENTASI KURIKULUM PADA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PROGRAM
MENJAHIT DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pelaksanaan di LKP mencakup komponen, proses dan tujuan kurikulum, serta terdapat hubungan antara implementasi kurikulum di LKP Kabupaten Bandung Barat dengan ketercapaian kompetensi menjahit sehingga para peserta didik dianggap kurang memenuhi standar kompetensi yang diharapkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Maka dari itu perlu dilakukan peninjauan mengenai implementasi kurikulum pada LKP program menjahit di Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Evaluasi Implementasi Kurikulum pada Lembaga Kursus dan Pelatihan Program Menjahit di Kabupaten Bandung Barat”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini secara umum adalah “Apakah implementasi Kurikulum pada Lembaga Kursus dan Pelatihan di Kabupaten Bandung Barat telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal” yang difokuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah komponen masukkan (*antecedent*) kurikulum sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal pada Lembaga Kursus dan Pelatihan program menjahit di Kabupaten Bandung Barat?
- 2) Apakah proses (*transaction*) implementasi kurikulum sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal pada Lembaga Kursus dan Pelatihan program menjahit di Kabupaten Bandung Barat?
- 3) Apakah hasil belajar (*outcome*) sesuai dengan tujuan yang telah disusun dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan

Richard Amri, 2018

EVALUASI IMPLEMENTASI KURIKULUM PADA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PROGRAM
MENJAHIT DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Nonformal pada Lembaga Kursus dan Pelatihan program menjahit di Kabupaten Bandung Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah melakukan penelitian ini, diharapkan memperoleh data empirik dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan tersebut di atas.

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kesesuaian pelaksanaan kurikulum dengan standar yang berlaku secara nasional pada Lembaga Kursus dan Pelatihan di Kabupaten Bandung Barat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memperoleh informasi yang dilengkapi data mengenai kesesuaian komponen masukkan Kurikulum (*antecedent*) dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal pada Lembaga Kursus dan Pelatihan program menjahit di Kabupaten Bandung Barat;
- 2) Untuk mendeskripsikan mengenai kesesuaian proses implementasi Kurikulum (*transaction*) dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal pada Lembaga Kursus dan Pelatihan program menjahit di Kabupaten Bandung Barat;
- 3) Untuk mendeskripsikan tentang kesesuaian hasil implementasi Kurikulum (*outcomes*) dengan tujuan Lembaga dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal pada Lembaga Kursus dan Pelatihan program menjahit di Kabupaten Bandung Barat.

Richard Amri, 2018

**EVALUASI IMPLEMENTASI KURIKULUM PADA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PROGRAM
MENJAHIT DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

- 1) Diharapkan dapat menambah wawasan khususnya berkaitan dengan implementasi kurikulum di Lembaga Kursus dan Pelatihan serta pendidikan nonformal pada umumnya.
- 2) Memberikan informasi pengetahuan tentang alur proses pengembangan kurikulum di satuan pendidikan nonformal.
- 3) Berdasarkan studi yang dilakukan semoga dapat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan nonformal sehingga dapat membangun kemitraan (*networking*) dengan dunia usaha dan dunia industri.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Pembuat Kebijakan

Memberi masukan serta informasi yang dibutuhkan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum pendidikan nonformal.

2) Bagi pengelola LKP

Menjadi gambaran dalam menciptakan suasana dan kondisi pembelajaran yang kondusif serta dapat digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi efektivitas kurikulum.

3) Bagi peserta didik

Menjadi referensi dalam mengambil bidang keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

4) Bagi masyarakat, dunia usaha dan dunia industri

Memberikan informasi agar masyarakat, dunia usaha dan dunia industri dapat berpartisipasi secara langsung dalam membangun pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan nonformal dan informal, serta dapat menyerap lulusan LKP sebagai tenaga kerja.

5) Bagi peneliti bidang sejenis berikutnya

Menjadi acuan dan rujukan agar lebih mendalami penelitian terkait kurikulum pada jenjang pendidikan nonformal dan informal sehingga memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam rangka mengembangkan sebuah kurikulum.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Struktur organisasi berupa sistematika penulisan dapat mempermudah pembaca dalam mendapatkan gambaran secara umum mengenai penyajian penelitian dalam tesis. Adapun sistematika penulisan pada tesis ini terbagi ke dalam beberapa bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama meliputi pembahasan masalah secara umum meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bagian kedua berisi berisi konsep, teori yang menunjang penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, serta kerangka berpikir peneliti terhadap permasalahan penelitian yang dihadapi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga bersifat prosedural berisi desain penelitian, partisipan dan subjek penelitian, pengumpulan data, dan analisis data yang dipilih oleh peneliti.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni 1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan masalah penelitian, dan 2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada bab I.

Richard Amri, 2018

*EVALUASI IMPLEMENTASI KURIKULUM PADA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PROGRAM
MENJAHIT DI KABUPATEN BANDUNG BARAT*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi, yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian yang dilakukan

1.6 Definisi Operasional

Berkaitan dengan penelitian, maka ada beberapa variabel yang dapat penulis definisikan secara operasional, antara lain:

1. *Evaluasi*: suatu proses pengumpulan dan analisis data empirik secara sistematis yang bertujuan membantu memahami dan menetapkan suatu alternatif keputusan untuk memperkuat dan memperbaiki metode atau pendekatan yang telah ada (Stufflebeam & Coryn, 2014). Pada penelitian ini, evaluasi dimaksudkan untuk menilai kesesuaian implementasi kurikulum pendidikan nonformal pada satuan pendidikan di Lembaga Kursus dan Pelatihan program menjahit.
2. *Implementasi Kurikulum*: tindakan-tindakan pelaksanaan dari rencana dan ide tersusun demi tujuan-tujuan yang telah digariskan dan ditetapkan. Dalam hal kurikulum Pendidikan Nonformal, implementasi kurikulum meliputi komponen, proses dan hasil program. Komponen-komponen kurikulum pendidikan nonformal terdiri atas masukan lingkungan (*environmental input*), masukan sarana (*instrumental input*), masukan mentah (*raw input*) dan masukan lain (*other input*). Proses (*processes*) yaitu interaksi edukasi antara masukan sarana, terutama pendidik, dengan masukan mentah yaitu peserta didik, untuk mencapai tujuan kurikulum. Sedangkan hasil kurikulum pendidikan nonformal mencakup hasil antara (*intermediate goal*) yaitu keluaran (*output*) dan tujuan akhir (*final goal*) yaitu pengaruh atau dampak (*outcome*) program pendidikan nonformal.

Richard Amri, 2018

EVALUASI IMPLEMENTASI KURIKULUM PADA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PROGRAM
MENJAHIT DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. *Lembaga Kursus dan Pelatihan Program Menjahit*: salah satu bentuk satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini, keterampilan yang dikaji adalah program menjahit karena merupakan keterampilan nomor dua yang paling diminati secara nasional dan nomor tiga di Provinsi Jawa Barat. Locus penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Dengan sampel penelitian adalah LKP Yani 8, LKP Mekar Sari, LKP Lucky dan LKP Novita.